

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keuangan negara, kita tidak asing lagi dengan istilah APBD. APBD merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran sendiri ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (yang biasanya satu tahun). Kemudian APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Nurlan Darise, 2006).

Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran baik “pendapatan maupun belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan menyelaraskan kenijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemeritah dan mempersiapkan

kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, yaitu : 1. dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat ; 2. fungsi utama anggaran adalah mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian ; 3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara (Nurlan Darise, 2006)

Seiring dengan perubahan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan, di mana sebelum reformasi sistem pemerintahan bersifat sentralistik dan sejak tahun 1999 berubah menjadi desentralisasi atau era otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan sesuai

tujuan pelaksanaan otonomi untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola Peningkatan PAD secara tepat dengan mengalokasikan dana tersebut pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Riko Noviatio, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Tahun 2010-2017 (Realisasi)

Tahun	Belanja Daerah	DAU	DAK
2010	112.153.407.859	19.247.315.618	819.605.499
2011	132.217.711.232	22.553.282.483	1.270.155.725
2012	179.445.843.759	27.381.818.820	1.332.525.148
2013	203.748.431.932	30.977.874.897	1.775.385.277
2014	219.334.869.858	34.121.932.565	1.873.244.771
2015	247.041.478.847	35.288.784.853	3.610.202.097
2016	264.098.478.582	38.538.077.004	44.528.571.272
2017	329.072.376.625	55.417.530.820	63.930.254.131

Sumber : Badan Pusat Statistik (Publikasi)

Dari Tabel 1.1 terlihat realisasi pengeluaran dan penerimaan pemerintah Provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Belanja Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2017, hal tersebut terjadi karena Dana Perimbangan berupa DAU dan DAK mengalami peningkatan. Belanja Daerah pada terendah yaitu pada tahun 2010 sebesar 112.153.407.859 (dalam Ribu Rupiah) dan tertinggi yaitu pada

tahun 2017 sebesar 329.072.376.625 (dalam Ribu Rupiah). Seiring dengan meningkatnya Belanja Daerah dari tahun 2010-2017, DAU dan DAK juga mengalami peningkatan. DAU terendah yaitu sebesar 19.247.315.618 pada tahun 2010 dan tertinggi yaitu sebesar 55.417.530.820 pada tahun 2017. Begitu juga dengan DAK, pada tahun 2010 DAK sebesar 819.605.499 dan terus meningkat sampai dengan 2017 sebesar 63.930.254.131. Peningkatan Belanja Daerah tersebut diiringi dengan peningkatan DAU dan DAK, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rosy Puspita Sari (2014) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga ketika DAU dan DAK mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan.

Tabel 1.2
Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2010-2017
(Persentase)

Tahun	DAU	DAK
2010	18,54	0,78
2011	16,11	0,91
2012	14,72	0,72
2013	15,05	0,86
2014	14,63	0,80
2015	14,54	1,49
2016	13,98	16,16
2017	17,36	20,03

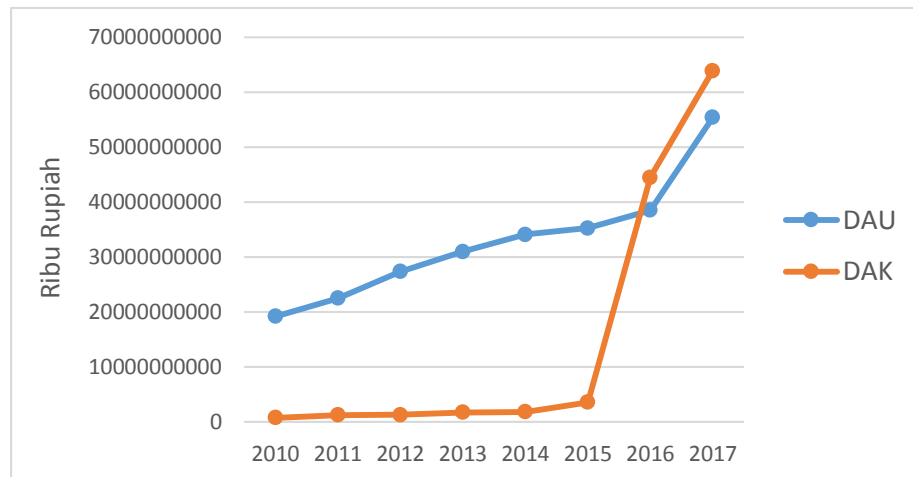
Sumber : Badan Pusat Statistik (Publikasi)

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa kontribusi variabel DAU dan DAK fluktuatif walaupun jika dilihat dari Tabel 1.1 secara nominal kontribusi masing-masing

variabel mengalami peningkatan setiap tahunnya terhadap Belanja Daerah. Untuk Variabel DAU selama kurun waktu 2010-2017 persentase kontribusi terbesar pada tahun 2010 yaitu DAU menyumbang sebesar 18,54% dan DAK memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2017 sebesar 20,03%.

Tahun 2010 kontribusi DAU ada pada posisi tertinggi sebesar 18,54% dan DAK hanya sebesar 0,78%. Kemudian tahun 2011 kontribusi DAU mengalami penurunan sebesar 2,43% menjadi 16,11 namun kontribusi DAK mengalami peningkatan sebesar 0,13% menjadi 0,91%. Tahun 2012 kontribusi DAU terus mengalami penurunan sebesar 1,39% dan DAK juga mengalami penurunan sebesar 0,19%. Tahun 2013 kontribusi DAU mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016, besarnya kontribusi DAU dari tahun 2013-2016 secara berurutan yaitu sebesar 15,05%;14,63%;14,54%;13,98% namun kontribusi DAK dari tahun 2013-2016 masih tetap fluktuatif dari tahun 2013 sebesar 0,86% kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 0,80% meningkat lagi pada tahun 2015 sebesar 0,69% menjadi 1,49% dan juga tahun 2016 meningkat sebesar 14,67% menjadi 16,16% yang menjadikan peningkatan kontribusi DAK tertinggi selama kurun waktu 2010-2017. Tahun 2017 menjadi tahun akhir dalam penelitian ini, kontribusi DAU dan DAK mengalami peningkatan dari 13,98% menjadi 17,36% dan dari 16,16% menjadi 20,03%. Secara keseluruhan peningkatan DAU dan DAK dari tahun 2010-2017 dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Pertumbuhan DAU dan DAK Provinsi di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam grafik pertumbuhan DAU dan DAK tersebut terlihat dari kurun waktu 2010-2017, DAU dan DAK mengalami kenaikan. Kenaikan DAK yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 sedangkan DAU mengalami kenaikan namun tidak begitu pesat seperti kenaikan DAK. Kenaikan DAK tahun 2017 sangat signifikan terjadi karena Pemerintah Pusat memberikan dananya untuk keuangan daerah sehingga dana yang dimiliki daerah cukup tinggi terutama pada Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2017, DAK mengalami kenaikan karena pada saat itu Pemerintah Pusat menyalurkan dananya untuk pemerintah daerah khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan jembatan. Hal itu terlihat pada saat itu terjadi banyak pembangunan khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Sehingga dari tahun ke tahun DAU dan DAK terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Belanja Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Apakah DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2017?.
2. Apakah DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2017?.
3. Apakah Jumlah Penduduk/Populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2017?.
4. Apakah Luas Wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2017?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Indonesia tahun 2010-2017.
2. Menganalisis pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia tahun 2010-2017.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk/Populasi terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia tahun 2010-2017.

4. Menganalisis pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Indonesia tahun 2010-2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data panel yaitu data periode waktu 2010-2017 (*time series*) yang terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia (*cross section*). Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa data publikasi dan tabel dinamis yang meliputi variabel Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. Selain diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data juga diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupa Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. Data yang diperoleh yaitu data berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2010-2017.

2. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data

cross section. Data *time series* atau data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan pada satu objek dengan beberapa periode waktu, sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada beberapa objek dalam satu waktu. Maka model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

$i = 1, 2, \dots, N$

$t = 1, 2, \dots, T$

Y = variabel dependen

X = variabel independen

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini, dimodifikasi dari jurnal Rochmatullah, Mahameru Rosy et al. (2016). “*Determinating the Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government*” adalah sebagai berikut :

$$BD = f\{DAU, DAK, POP, LW\}$$

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 POP_{it} + \beta_4 LW_{it} + e$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

POP	= Jumlah Penduduk/Populasi
LW	= Luas Wilayah
β_0	= <i>Intercept</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
i	= data <i>cross section</i>
t	= data <i>time series</i>
i x t	= banyaknya data panel
e	= <i>error term</i>

Estimasi model ekonometrika data panel di atas meliputi langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengestimasi model data panel PLS (*Partial Least Square*), FEM (*Fixed Effect Model*), REM (*Random Effect Model*).
- b. Uji pemilihan model data panel

b) *Uji Chow*

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara model PLS dengan FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

H_0 : model menggunakan *Common Effect*/PLS

H_a : model menggunakan *Fixed Effect* (FEM)

c) *Uji Hausman*

Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara REM dengan FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

H_0 : model menggunakan *Random Effect* (REM)

H_a : model menggunakan *Fixed Effect* (FEM)

d) *Uji Langrange Multiplier*.

Uji Langrange Multiplier adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara PLS dengan REM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

H_0 : model menggunakan *Common Effect* (PLS)

H_a : model menggunakan *Random Effect* (REM)

- c. Uji kebaikan model (Uji F) pada model data panel terpilih dan Interpretasi R-Square.
- d. Uji validitas pengaruh (Uji t)
- e. Semua pengujian tersebut dilakukan dengan cara *time series* dan *cross section*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang dapat membantu penyusunan skripsi. Dalam bab ini juga

dijelaskan kerangka pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis serta estimasi model yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan dari hasil penelitian serta mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Indonesia.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN